



Bangkit dan Tumbuh

Untuk BPK yang Makin Kuat dan Makin Hebat

LAPORAN TAHUNAN **2022**

Laporan Tahunan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2022

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210 Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288
Website: <http://www.bpk.go.id>
E-mail: eppid@bpk.go.id

Cetakan pertama: Januari 2023
© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**Ketentuan Pidana**

Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Akses Informasi



Website:

www.bpk.go.id

wartapemeriksa.bpk.go.id

jdih.bpk.go.id

jurnal.bpk.go.id

badiklatpkn.bpk.go.id



E-mail: eppid@bpk.go.id

Sosial Media:

- twitter** : @bpkri
- instagram** : @bpkriofficial
- facebook** : @humasbpkri.official
- youtube** : BPK RI Official
- whatsapp** : +62 8111 90 7010
- Tiktok** : @bpk.ri



Alamat Surat:

PO BOX 4330 Jakarta 10043



Alamat Kantor Pusat:

Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 31 Jakarta Pusat 10210



Telp: +6221 255 49000

| Faks: +6221 5795 0288



Sekapur

Sirih

Indonesia mengalami masa-masa yang sulit lantaran pandemi Covid-19. Lantaran pandemi, bisa dikatakan tantangan yang dihadapi seluruh elemen masyarakat sangat berat. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, pangan, dan sektor-sektor krusial lainnya.

Berbagai krisis yang bertubi-tubi pun mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Contohnya, untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direlokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.

Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena ada risiko penyelewengan terhadap keuangan negara. Untuk itu, dibutuhkan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi situasi sulit tersebut dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Tahun 2022, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas dua prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. "BPK terus berupaya keras untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik," tegas Ketua BPK.

“

Penting kami tekankan bahwa, BPK terus berupaya keras untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik.

ISMA YATUN, KETUA BPK

BPK juga memberikan *assurance* atas pelaksanaan anggaran saat krisis tersebut. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan kepada 83 laporan keuangan kementerian negara/lembaga (K/L) dari total 87 laporan keuangan K/L (95%) dan kepada 500 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari total 542 LKPD (92%).

Seiring dengan kondisi yang semakin membaik, tentunya kita semua senantiasa berharap dan berdoa agar segala upaya kolaboratif yang telah dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19, bangsa Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Dedikasi BPK pun mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Khususnya terkait sinergi BPK dan pemerintah dalam menghadapi krisis. "BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta (16/8/2022).

BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp302,56 triliun sejak tahun 2005 hingga semester I 2022.



BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah.

PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI)

dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Secara kumulatif hingga semester I 2022, penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan tercatat sebesar Rp124,60 triliun. Hal ini menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK selain melakukan perbaikan tata kelola keuangan negara.

Tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan prinsip kolaborasi dan sinergi dalam rangka peningkatan kapasitas BPK.

Dalam Presidensi G20 Indonesia, BPK menginisiasi pembentukan Supreme

Audit Institution (SAI) 20, sebagai *engagement group* (EG) baru. SAI20 Summit pun sukses digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.

Kita patut berbangga dengan terselenggaranya acara bersejarah ini. Karena SAI20 telah menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang ikut menghadiri dan membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Bali (29/8/2022).

"Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia," kata dia. Wapres pun menambahkan bahwa hal ini menjadi nilai tambah bagi komunitas global dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih tangguh dan kolaborasi yang efektif antara BPK dan pemerintah.

KTT SAI20 mengesahkan *rules of procedure* (RoP) sebagai tata kelola SAI20, dan 12 poin komunike (pernyataan bersama) yang disampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia.

Selain SAI20, prestasi gemilang lain BPK yaitu terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) Periode Tahun 2023. Hal ini meningkatkan kapasitas BPK dalam pengelolaan pemeriksaan sesuai standar dan praktik terbaik internasional.

Pembentukan SAI20
akan menjadi salah
satu warisan dari
Presidensi G20
Indonesia.

**WAKIL PRESIDEN
MA'RUF AMIN**

saat menghadiri SAI 20 Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (29/8/2022).

Jakarta, Maret 2023

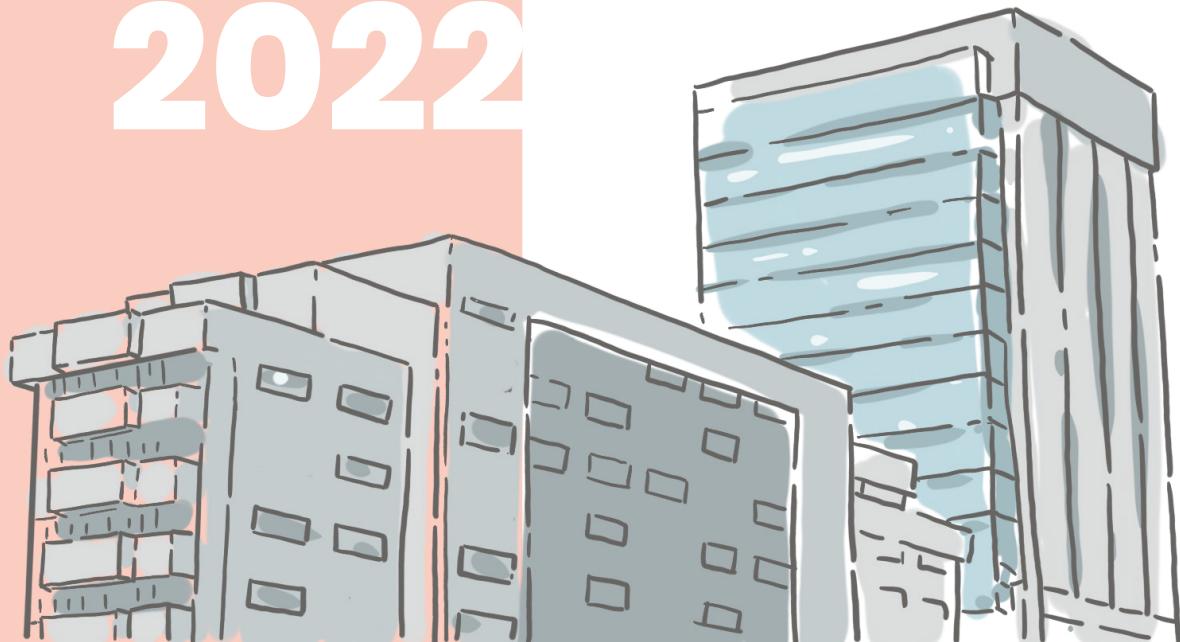
Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

26-27 Januari

BPK menyelenggarakan *technical meeting* sebagai kegiatan resmi pertama Supreme Audit Institutions 20 (SAI20).

Ikhtisar Kejadian Penting

2022



1 Februari

BPK kembali melaksanakan *entry meeting* dengan manajemen IMO International Maritime Law Institute (IMLI). *Entry meeting* ini merupakan tanda dimulainya pemeriksaan BPK atas laporan keuangan (LK) IMLI tahun anggaran (TA) 2021.

14 Februari

Sebagai upaya pencegahan Covid 19, BPK mengadakan kegiatan vaksinasi tahap kedua kepada seluruh pegawai aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan BPK di Jakarta.

31 Maret

BPK berpartisipasi sebagai pembicara dalam *joint session of the 2022 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum and the Indonesian G20 Presidency*.

21 April

Isma Yatun dan Agus Joko Pramono resmi mengemban jabatan sebagai Ketua dan Wakil Ketua BPK usai mengucapkan sumpah jabatan dan janji di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat

19 April

Pengambilan sumpah jabatan dua Anggota BPK terpilih periode jabatan 2022-2027, Isma Yatun dan Haerul Saleh di Gedung Mahkamah Agung, di Jakarta.



20-22 Juni

Sebagai rangkaian kegiatan untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, BPK menyelenggarakan SAI20 Senior Officials Meeting (SOM) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur secara hibrida.

15 Juli

BPK kembali diundang sebagai panelis dalam United Nations High Level Political Forum (HLPF) Side Event di New York.

19 Agustus

Untuk sosialisasi SAI20, BPK mengundang sejumlah pimpinan redaksi media massa nasional untuk menghadiri *coffee morning* di Kantor Pusat, Jakarta.

22 September

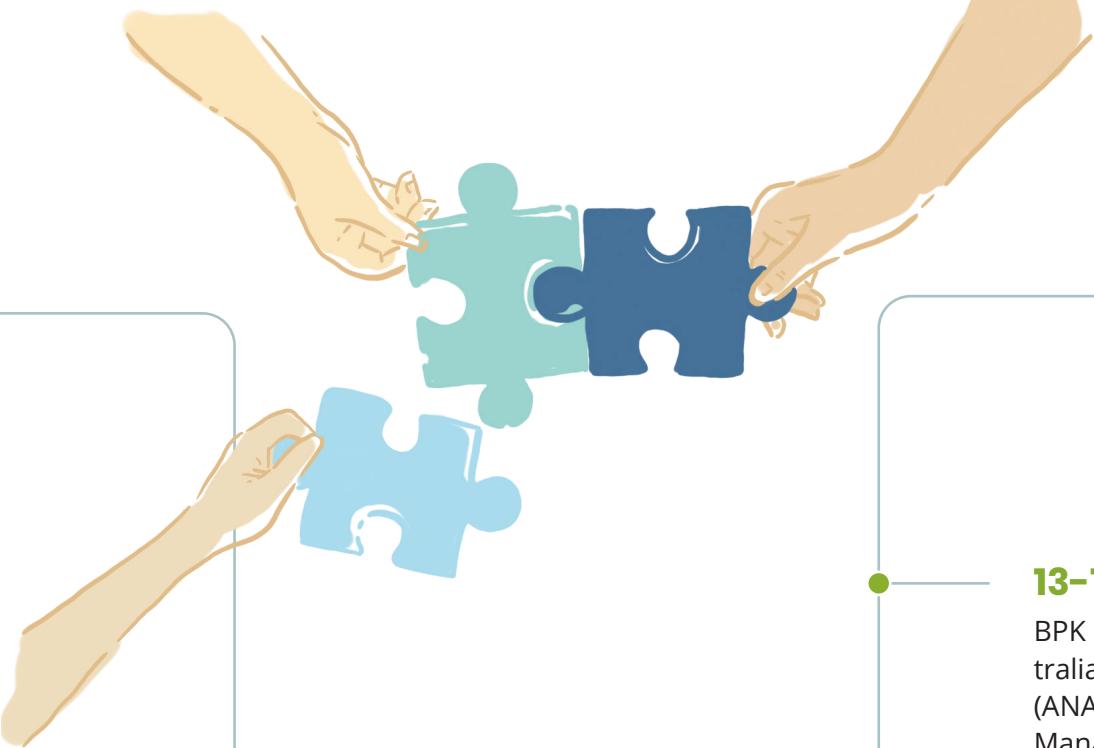
BPK menerima penghargaan dari Kemenkeu karena capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) tahun 2021 dan meraih WTP 15 kali berturut-turut sejak LK tahun 2007.

21 September

BPK melaksanakan pertemuan bilateral dengan Board of Audit of Japan di Tokyo, Jepang.

29-30 Agustus

BPK menyelenggarakan SAI20 Summit di Nusa Dua, Bali



3 Oktober

Pembukaan kegiatan pemberian sebanyak 1.405 calon pegawai negeri sipil (CPNS) BPK formasi tahun 2021 golongan II dan III di kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

4 Oktober

BPK menyerahkan IHPS I tahun 2022 kepada Ketua DPR dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

13-14 Oktober

BPK mengunjungi kantor Australian National Audit Office (ANAO) dalam rangka Senior Management Dialogue (SMD) sebagai bentuk implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi.

6 Oktober

BPK memberi *keynote speech* di acara The 8th G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

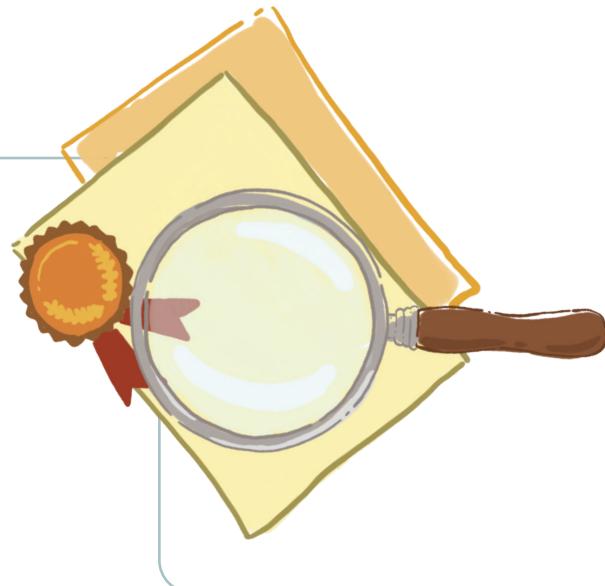
7-11 November

The XXIV International Congress of Supreme Audit Institutions (INCOSAI) digelar di Rio de Janeiro, Brasil. BPK tanda tangani pembaruan MoU dengan Intosai Development Initiative (IDI) di sela-sela penyelenggaraan XXIV INCOSAI Brasil 2022 di Rio de Janeiro.

Selain itu, Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, sebagai anggota INTOSAI Development Initiative (IDI) Board menghadiri Rapat Dewan Pengarah IDI atau IDI Board Meeting yang diselenggarakan secara tatap muka untuk pertama kalinya sejak pandemi.

28 November

Kegiatan rapat koodinasi teknis (rakornis) Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) V dan AKN VI di Bandung, Jawa Barat.



29 November

BPK RI terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB, di Santiago, Chile untuk periode Desember 2022-Desember 2023.

28-29 November

BPK hadir dalam pertemuan Panel Auditor Eksternal PBB ke-62 (the 62nd Regular Session of the Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) di kantor Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) PBB di Santiago, Chile.

6 Desember

BPK meraih empat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI), yaitu pada satuan kerja (satker) Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan demikian, sampai dengan 2022, BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM.

20 Desember

BPK menerima penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai pengakuan terhadap BPK sebagai inisiator pembentukan dan ketua SAI20 dalam Presidensi G20 Indonesia dalam acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia di Jakarta.

7

Sekapur
Sirih

19

BAB 1

Kinerja
BPK

53
BAB 2

SAI 20

69
BAB 3

Tentang
BPK

97
BAB 4

Tantangan
ke Depan

Draftair | Si





BAB 1

Kinerja **BPK**

Penyelamatan dan Pengembalian **Uang Negara**

BPK telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp229,29 triliun dari periode tahun 2005-Semester I 2022. Jumlah itu berasal antara lain dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah senilai Rp124,60 triliun, koreksi subsidi sebesar Rp66,08 triliun, serta koreksi *cost recovery* senilai Rp38,61 triliun.

Tahun	Nilai Penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara menindaklan- juti Rekomendasi BPK - Akumulasi dari periode 2005-Semester I 2022	Koreksi Subsidi berdasarkan tahun IHPS	Koreksi Cost Recovery	Total
Semester I 2022	2.677.269,02	1.621.323,20	1.335.487,19	5.634.079,41
2020-2021	12.756.507,24	6.635.844,43	6.311.974,49	25.704.326,16
2015-2019	29.756.630,90	22.507.364,48	22.133.575,42	74.397.570,80
2010-2014	31.872.775,10	21.219.546,42	7.874.756,11	60.967.077,63
2005-2009	47.537.993,05	14.099.923,22	953.717,43	62.591.633,70
Total 2005- Semester I 2022	124.601.175,32	66.084.001,75	38.609.510,63	229.294.687,71

* _____
nilai dalam juta rupiah

Ribuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) beserta rekomendasinya dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Upaya BPK tersebut mampu mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan entitas. Hal ini tercermin dari capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Selain memeriksa laporan keuangan, BPK setiap tahun juga mengawal program-program yang dijalankan entitas melalui pemeriksaan kinerja hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). ■

Hasil Pemeriksaan Semesteran

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara rutin merilis Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I dan II setiap tahun anggaran. IHPS tersebut menjadi bahan dasar penyusunan laporan tahunan BPK. Laporan Tahunan 2022 memuat hal-hal dan data yang dianggap penting dan signifikan, yang tersaji dalam IHPS II 2021 dan IHPS I 2022. Informasi lebih lengkap mengenai IHPS dapat diakses melalui link <https://www.bpk.go.id/ihps>.



“

Secara kumulatif hingga Semester I 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp124,60 triliun.

KETUA BPK **ISMA YATUN**

Ringkasan Hasil Pemeriksaan Semester II 2021 dan Semester I 2022



Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan

1.306



Temuan

13.713



Rekomendasi

38.075

*

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

Pengelola Anggaran: Pemerintah Pusat

Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Temuan	Rekomendasi
Pemeriksaan Keuangan	139	1.258	3.375
Pemeriksaan Kinerja	25	180	494
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	62	588	1.448
Total:	226	2.026	5.317

Pengelola Anggaran: Pemerintah Daerah

Pemeriksaan Keuangan	542	6.982	18.989
Pemeriksaan Kinerja	72	583	1.765
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	97	743	2.215
Total:	711	8.308	22.969

Pengelola Anggaran: BUMN dan Badan Lainnya

Pemeriksaan Keuangan	4	42	134
Pemeriksaan Kinerja	5	48	157
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	66	862	2.213
Total:	75	952	2.504

Pemeriksaan PN1 dan PN3*

Pemeriksaan Kinerja	256	2.157	6.423
Pemeriksaan DTT-Kepatuhan	38	270	862
Total:	294	2.427	7.285

Sumber: IHPS II 2021 dan IHPS I 2022

Jumlah tersebut tidak termasuk hasil pemeriksaan investigatif dan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik.

* _____

PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
PN 3 adalah meningkatkan sumber daya manusia dan berdaya saing.

Nilai Total

Temuan, Permasalahan, dan Rekomendasi

IHPS II Tahun 2021 dan IHPS I Tahun 2022 mengungkap 13.713 temuan yang terdiri atas 21.685 permasalahan. Rincian permasalahan tersebut antara lain:

Permasalahan:

3.711 permasalahan senilai Rp2,68 triliun

Ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan

9.836 permasalahan senilai 47,03 triliun

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

8.138 permasalahan

Kelemahan sistem pengendalian intern

Rekomendasi berupa penyetoran uang/penyerahan aset.

Pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar **Rp2,60 triliun**



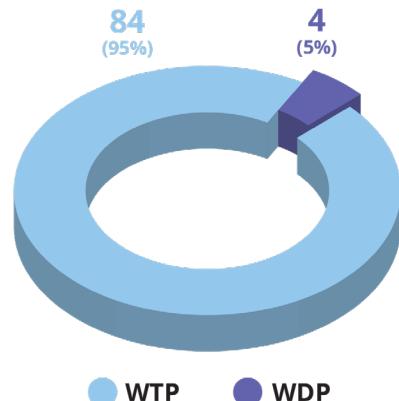
**Nilai Total
Temuan:**

**Rp49,71
triliun**

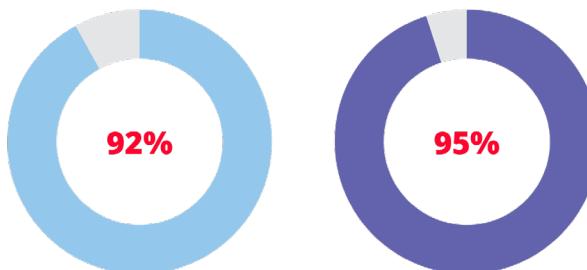
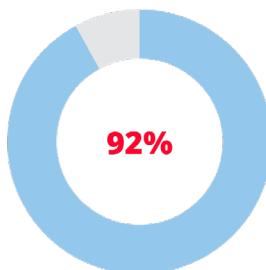
Sumber: IHPS II 2021 dan IHPS I 2022

Capaian Opini WTP Lampaui Target RPJMN

**Opini atas LKKL dan LKBUN
Tahun 2021**

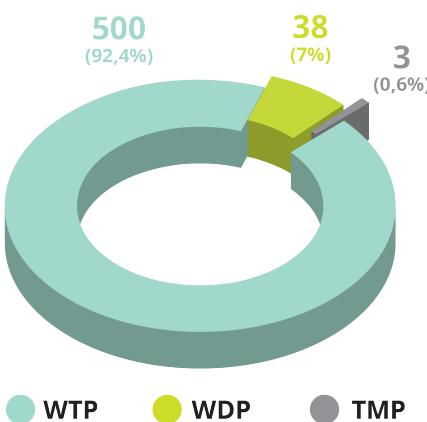


Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2021



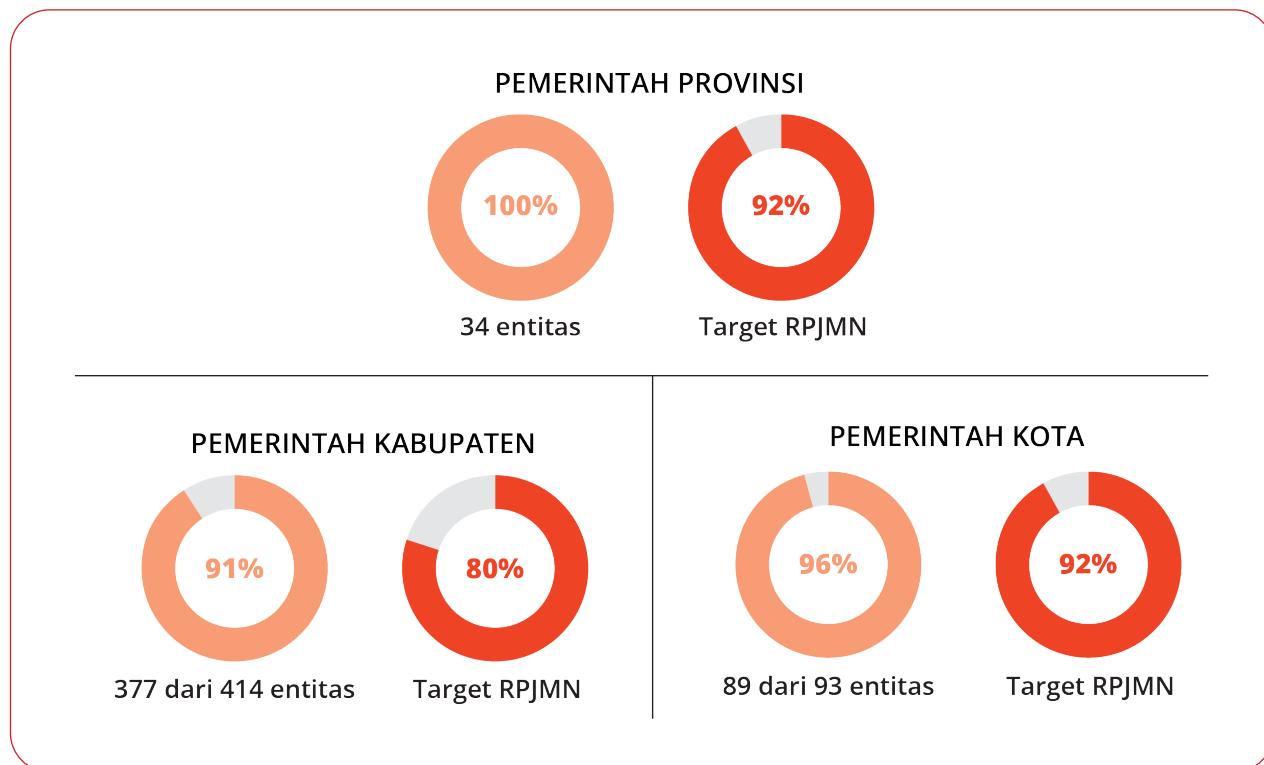
Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus mengalami peningkatan. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Periksaan Semester I 2022, capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk LKKL dan LKPD telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Opini LKPD Tahun 2021



sumber: IHPS / 2022

Capaian Opini WTP Berdasarkan Tingkat Pemerintahan



sumber: IHPS I 2022

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

HPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per semester I 2022 atas LHP yang diterbitkan periode 2005-semester I 2022. Pada periode 2005 hingga semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp302,56 triliun.

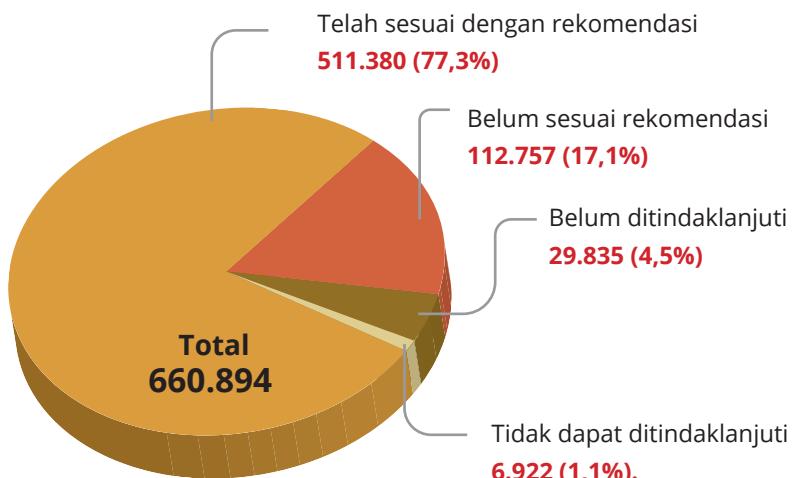
Perinciannya sebagai berikut:

Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 511.380 rekomendasi (77,3%) sebesar Rp148,19 triliun.

Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 112.757 rekomendasi (17,1%) sebesar Rp111,43 triliun.

Belum ditindaklanjuti sebanyak 29.835 rekomendasi (4,5%) sebesar Rp19,60 triliun.

Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 6.922 rekomendasi (1,1%) sebesar Rp23,34 triliun.

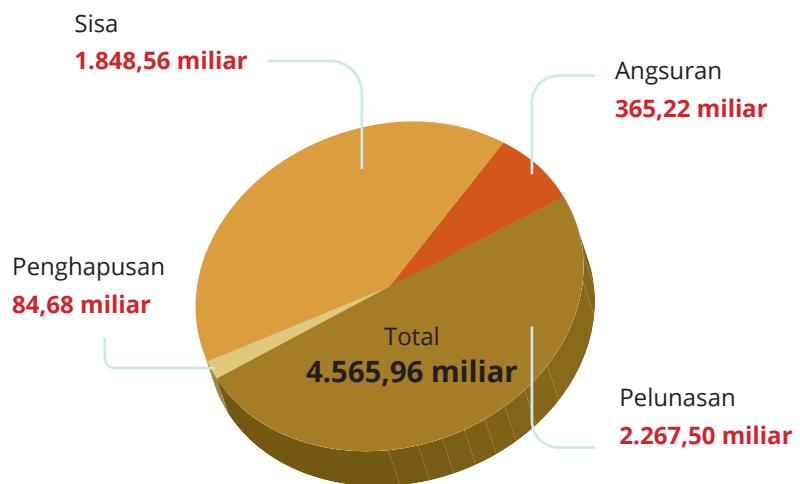


Secara kumulatif sampai dengan semester I 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-semester I 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan adalah **sebesar Rp124,60 triliun**.

**Hasil pemantauan atas pelaksanaan
TLRHP atas LHP yang diterbitkan periode
2005 hingga semester I 2022.**

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

IHPS I Tahun 2022 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2022 dengan status telah ditetapkan dengan nilai sebesar Rp4,56 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.



Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-Semester I 2022 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

Pemantauan Hasil Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli

IHPS I tahun 2022 memuat hasil pemantauan atas laporan hasil pemeriksaan investigatif (PI) dan penghitungan kerugian negara (PKN) serta pemberian keterangan ahli (PKA) periode 2017-semester I 2022.

Pada periode 2017-semester I 2022, BPK menyampaikan 25 laporan hasil PI dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan 311 laporan hasil PKN dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp57,53 triliun kepada instansi yang berwenang. BPK juga telah melaksanakan 324 kasus PKA pada tahap persidangan.

Pemanfaatan atas laporan hasil PI dan PKN serta PKA adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 25 laporan hasil PI yang sudah disampaikan, 9 laporan telah dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan 16 laporan dimanfaatkan dalam proses penyidikan;
2. Sebanyak 311 laporan hasil PKN yang telah disampaikan, 46 laporan sudah dimanfaatkan dalam proses penyidikan dan 265 kasus sudah dinyatakan P-21 (berkas penyidikan sudah lengkap);
3. Sebanyak 324 PKA di persidangan seluruhnya digunakan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum.



Performance **Highlight** **2022**

Auditorat Utama Keuangan Negara I

● Jumlah Temuan : **440**

Rp141.371,23

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp45.886,85

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **1.106**

Rp 182.378,40

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Rp 6.238,11

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **375.874,59 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

22

Jumlah LHP Keuangan

13

Jumlah LHP Kinerja

31

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

“

Lembaga-lembaga pemeriksa di dunia penting melihat bagaimana pemeriksaan yang dilakukan dapat mendorong terciptanya sistem keamanan dan pertahanan untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan global.

Nyoman Adhi Suryadnyana

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK

sumber: wartapemeriksa.bpk.go.id 19 September 2022

Auditorat Utama Keuangan Negara II

● Jumlah Temuan : **460**

Rp237.738,13

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp6.199.396,87

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **1.221**

Rp 27.545,29

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **6.500.629,94 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

27

Jumlah LHP Keuangan

8

Jumlah LHP Kinerja

12

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



BKPM
BANU BODONG SURNAMANAN MUSI



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMEN
KOP
UKM



Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN



OJOK
OTORITAS
JASA
KEUANGAN



Kementerian
Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA



PERUSAHAAN PENGETOLAKA ASET
PPA



KEMENTERIAN
PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA



BSN
BANDAR
STANDARISASI
NASIONAL

serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Kehadiran pemeriksa eksternal dan aparat pengawasan intern merupakan wujud nyata komitmen penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang lebih kuat dan lebih baik serta berkesimbangan.

Daniel Lumban Tobing

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK

sumber: Majalah Warta Pemeriksa

Auditorat Utama Keuangan Negara III

● Jumlah Temuan : 847

- Jumlah Rekomendasi: **2.361**

Rp1.375.053,36

Nilai Kekurangan Penerimaan (Rp Juta)

Rp7.153.329,89

Nilai Potensi Kerugian (Rp Juta)

Rp892.028,50

Nilai Kerugian (Rp Juta)

Rp213.591,87

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **9.634.003,62 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

48

Jumlah LHP Keuangan

13

Jumlah LHP Kinerja

17

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Perkembangan teknologi informasi begitu cepat. Kecepatan itu harus diimbangi dengan keinginan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan serta beradaptasi. Kita punya fasilitas dan infrastruktur yang sudah mumpuni. Tapi, tantangan besarnya adalah bagaimana kita memanfaatkannya.

Achsanul Qosasi

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK

Sumber: wartapemeriksa.bpk.go.id 21 Oktober 2022

Auditorat Utama Keuangan Negara IV

● Jumlah Temuan : **259**

Rp12.805.320,01

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **669**

Rp270.272,74

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

Rp270.476,84

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **13.346.069,59 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

30

Jumlah LHP Keuangan

5

Jumlah LHP Kinerja

7

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

“

Jangan pernah kita lelah, dan jangan pernah kita kurang bersemangat untuk terus berkontribusi dan belajar demi mewujudkan akuntabilitas untuk semua.

Haerul Saleh

Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK

sumber: www.bpk.go.id 28 Juli 2022

Auditorat Utama Keuangan Negara V

● Jumlah Temuan : **5.500**

Rp667.376,07

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp386.547,59

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **15.965**

Rp1.080.060,15

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Rp73.716,27

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **2.207.700,08 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

293

Jumlah LHP Keuangan

154

Jumlah LHP Kinerja

72

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

“

Independensi, integritas, dan profesionalisme, merupakan landasan bagi seluruh insan BPK. Marilah kita bangun dan junjung tinggi ketiga nilai dasar tersebut dalam setiap pelaksanaan tugas BPK agar marwah dan martabat BPK senantiasa terjaga.

Ahmadi Noor Sutip

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK

sumber: www.bpk.go.id 11 November 2022

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

● Jumlah Temuan : **5.232**

Rp233.135,70

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp126.678,14

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **14.261**

Rp3.135.145,74

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Rp338.133,99

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **3.833.093,57 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

263

Jumlah LHP Keuangan

159

Jumlah LHP Kinerja

59

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

“

Peningkatan opini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan buah dari komitmen dan hasil kerja keras para kepala daerah beserta jajarannya dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah, yang diwujudkan dalam penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara tertib, transparan dan akuntabel.

Pius Lustrianang

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK

sumber: www.bpk.go.id 15 September 2022

Auditorat Utama Keuangan Negara VII

● Jumlah Temuan : **975**

Rp9.936.700,25

Nilai Kekurangan
Penerimaan
(Rp Juta)

Rp655.443,86

Nilai Potensi
Kerugian
(Rp Juta)

● Jumlah Rekomendasi: **2.492**

Rp1.196.619,21

Nilai Kerugian
(Rp Juta)

Rp2.030.395,09

Nilai 3E
(Rp Juta)

Nilai Total Permasalahan: **13.819.158,41 (Rp Juta)**

Kegiatan Pemeriksaan

2

Jumlah LHP Keuangan

6

Jumlah LHP Kinerja

65

Jumlah LHP DTT

Entitas yang diperiksa



BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

“

Keberhasilan pemeriksaan itu tidak saja tergantung dari pengetahuan auditor tentang pemeriksaan, namun juga terkait dengan *subject matter* yang diperiksa. Pemahaman dan penguasaan *subject matter* yang sebenarnya menjadi kunci utama dalam keberhasilan pemeriksaan.

Hendra Susanto

Anggota VII/Pimpinan Keuangan Negara VII BPK

sumber: www.bpk.go.id 13 September 2022

Auditorat Utama Investigasi

Kegiatan Pemeriksaan

	Penghitungan Kerugian Negara	Pemberian Keterangan Ahli pada Tahap Penyidikan	Pemberian Keterangan Ahli pada Persidangan
Pusat	5	45	11
Daerah & BUMD	28	61	87
BUMN	7	48	69
Total	40	154	167

Nilai Kerugian Negara/Daerah (dalam miliar rupiah)

Pusat : 3.505,20

BUMN : 325,08

Daerah & BUMD : 825,08

Total : 4.655,36

Pemanfaatan Laporan hasil PI/PKN/PKA oleh Instansi Berwenang Dalam Rangka Penegakan Hukum

50

Pemanfaatan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif (PI)

- 18 LHP PI Digunakan untuk Tahap Penyelidikan
- 32 LHP PI Digunakan untuk Tahap Penyidikan

604

Pemanfaatan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN)

- 98 LHP PKN Digunakan untuk Tahap Penyidikan
- 506 LHP PKN Digunakan untuk Tahap Penyidikan yang sudah lengkap (P-21)

618

Pemanfaatan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) Persidangan

- 618 PKA Digunakan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum



Penyidik dan pemeriksa juga harus konsisten dengan domain masing-masing, yaitu APH pada aspek hukum dan konstruksi kasus, sedangkan pemeriksa harus konsisten pada metode investigasi dan penghitungan kerugian negara.

Agus Joko Pramono
Wakil Ketua BPK

sumber: www.bpk.go.id

Prestasi BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki catatan kinerja dan prestasi yang luar biasa pada 2022. Misalnya saja penghargaan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 15 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan. Kemudian penghargaan Implementasi Manajemen ASN

Terbaik dalam BKN Awards 2022.

BPK juga mendapatkan penghargaan sebagai lembaga terpopuler di media cetak pada 2021 dalam the 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. Seluruh prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen BPK dalam mendorong kesejahteraan bangsa.

- Opini WTP 15 kali berturut-turut

BPK menerima penghargaan dari Kemenkeu karena capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) tahun 2021 dan meraih WTP 15 kali berturut-turut sejak LK tahun 2007.



● Penghargaan WBBM

BPK meraih empat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI), yaitu pada satuan kerja (satker) Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan demikian, sampai dengan 2022, BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM. Penghargaan dengan predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi dalam program pembangunan zona integritas. Untuk dapat memperoleh predikat tersebut, satker harus mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terlebih dahulu dan melalui serangkaian penilaian, baik penilaian internal oleh Inspektorat Utama BPK maupun penilaian oleh tim penilai nasional Kementerian PANRB.



Bronze winner Majalah Warta Pemeriksa

Majalah Warta Pemeriksa meraih penghargaan bronze winner dalam The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022



Lembaga terpopuler di media cetak tahun 2021

BPK meraih penghargaan sebagai lembaga terpopuler di media cetak tahun 2021 dalam The 7th Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2022. Pemberian penghargaan dilaksanakan di Jawa Tengah pada 25 Maret 2022

• JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022

BPK RI memperoleh penghargaan sebagai Anggota JDIH Nasional Terbaik I Tahun 2022 kategori lembaga negara. Penghargaan diberikan pada Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIH Nasional Terbaik Tahun 2022 di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2022 oleh Menteri Hukum dan HAM



BKN Awards

Dalam BKN Awards 2022 yang diadakan pada tanggal 21 Juli 2022 di Batam, BPK memperoleh tiga penghargaan yaitu:



- Peringkat 1 atas capaian dalam perencanaan kebutuhan dan mutasi kepegawaian



Peringkat 4 atas capaian dalam
penerapan pemanfaatan data-sistem
informasi dan CAT



- Implementasi manajemen ASN terbaik

Bronze winner Anugerah Humas Indonesia 2022

BPK menerima penghargaan bronze winner untuk kategori kanal digital subkategori aplikasi pada ajang Anugerah Humas Indonesia 2022 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2022 di Malang.



Terbaik II Inhouse Magazine

Majalah Warta Pemeriksa berhasil mendapatkan Terbaik II untuk kategori Penerbitan Media Internal (Inhouse Magazine) Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD, dan Perguruan Tinggi Negeri. Penghargaan diberikan pada Malam Anugerah Media Humas 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis 24 November 2022.

Sistem Merit Manajemen ASN kategori Sangat Baik

BPK menerima penganugerahan dari Komisi ASN dengan kategori SANGAT BAIK dalam pelaksanaan Sistem Merit Manajemen ASN. Penghargaan diberikan oleh Menteri PAN RB Azwar Anas pada acara Anugerah Meritokrasi 2022 Komisi ASN di Jakarta, 8 Desember 2022.



Pengakuan BPK di Kancalah Dunia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen untuk terus meningkatkan kiprah di kancah internasional. Untuk itu, berbagai program dan strategi pun sudah disiapkan untuk meningkatkan *positioning* BPK di dunia. Tekad ini sejalan dengan upaya BPK untuk meningkatkan peran dan kontribusi dalam mengawal keuangan negara.

Berbagai pencapaian telah diraih yang menjadi jejak langkah BPK di dunia internasional. Mulai dari mendapat kepercayaan untuk dipilih sebagai auditor eksternal lembaga-lembaga internasional. Seperti International Anti-Corruption Academy (IACA), International Atomic Energy Agency, dan International Maritime Organization.

Di tingkat global, BPK juga tak hanya hadir sebagai peserta atau-pun penyelenggara acara, namun juga sebagai *driving force* dalam lingkup kelembagaan. Ini terbukti dari jabatan-jabatan internasional strategis yang berhasil diraih BPK, mulai dari ASEANSAI, ASOSAI, INTOSAI Development Initiative, dan puncaknya adalah di United Nations.

Kiprah BPK di Internasional

Inisiasi pembentukan Supreme Audit Institution (SAI) 20 menjadi puncak dari keterlibatan BPK di organisasi internasional pada 2022. Peran ini merupakan hal yang penting karena memberikan sebuah konteks bagaimana Indonesia, dalam ini BPK, dapat menjadi pendorong gerakan mengawal pengelolaan keuangan di 20 negara.

Keterlibatan dalam organisasi internasional merupakan upaya agar peran BPK tidak saja semata memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Akan tetapi juga sejalan dengan INTOSAI Principle-12 "Value and Benefits of SAI: Making a Difference to the lives of citizens".

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
1. Menginisiasi pembentukan SAI20	Memanfaatkan momentum presidensi Indonesia di G20 pada tahun 2022, BPK berinisiatif untuk membentuk Supreme Audit Institution (SAI) 20 sebagai <i>engagement group</i> dari G20.
2. <i>Project leader beberapa paper dan guidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Research Paper on Innovative Audit Technology di bawah kerangka INTOSAI WG on Big Data ● Audit guidance on Sustainable Transport di bawah kerangka INTOSAI WGEA ● Tim penyusun Handbook on Budget Credibility ● The 13th ASOSAI research Project on Remote Audit
3. Menjadi <i>resource person</i> dalam berbagai kegiatan internasional	BPK dipercaya untuk menjadi <i>resource person</i> dalam berbagai program peningkatan kapasitas SAI di komunitas internasional terutama di IDI. Antara lain, dalam program IDI SAI PMF, TAI program, dan <i>e-learning program</i> .

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
Menjadi pembicara dalam berbagai konferensi internasional	<p>UN HLPF Side Event : Accelerating Sustainable Solutions – Supreme Audit Institutions Contribution to a Resilient Future</p> <p>BPK memaparkan pengalaman dalam melakukan reviu Voluntary National Review (VNR) Indonesia 2021 dalam <i>side event</i> UN HLPF-Accelerating Sustainable Solutions-Supreme Audit Institutions Contribution to a Resilient Future di New York pada 15 Juli 2022.</p>
	<p>Arab Forum for Sustainable Development (AFSD)</p> <p>BPK menjelaskan tentang faktor yang dapat dilakukan SAI untuk dapat berkontribusi secara efektif dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada 16 Maret 2022.</p>
	<p>Joint session of the 2022 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum and the Indonesian G20 Presidency</p> <p>BPK diundang menjadi salah satu pembicara pada sesi "Protecting the integrity of public finances amid a pandemic: Taking stock of the effectiveness of external and internal audit" pada 31 Maret 2022.</p>
<p>4.</p> <p>Penandatanganan MoU dan seminar bilateral terkait penyelesaian kerugian negara dengan Italian Corte dei Conti</p>	<p>IDI SAI PMF Webinar</p> <p>BPK menjadi pembicara tamu di "IDI SAI PMF Webinar on Building SAI Capacity through SAI PMF" pada 31 Mei 2022.</p>
<p>5.</p>	<p>BPK melaksanakan penandatanganan kerja sama bilateral dalam bidang pemeriksaan sektor publik serta seminar bilateral terkait penyelesaian kerugian negara di Italia pada 7 Juni 2022.</p>

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
6. <i>Senior management dialogue</i> antara BPK dan ANAO	<i>Senior management dialogue (SMD)</i> antara BPK dan ANAO sebagai bentuk implementasi kerja sama bilateral antara kedua institusi di kantor ANAO pada 13-14 Oktober 2022.
7. <i>Joint workshop</i> antara BPK dan The State Audit Office of Vietnam (SAV)	BPK dan The State Audit Office of Vietnam (SAV) perkuat kapasitas pemeriksaan melalui pelaksanaan <i>joint workshop</i> yang dilaksanakan pada 27 September 2022 di Jakarta.
8. Pertemuan bilateral antara BPK dengan SAI Brazil, SAO Poland, ANAO, GCA Saudi Arabia, SAI India di sela-sela pelaksanaan SAI20 Summit	BPK menyelenggarakan pertemuan bilateral dengan <i>SAI counterpart</i> pada tanggal 28, 30 Agustus dan 1 September 2022. Melalui pertemuan ini, BPK menjajaki kemungkinan kerja sama bilateral dengan the Tribunal de Contas da União (SAI Brazil); membahas rencana kerja sama bilateral selanjutnya dengan SAO Poland, ANAO dan GCA Saudi Arabia; dan serah terima auditor eksternal IAEA kepada SAI India.
9. BPK perkuat hubungan kerja sama bilateral dengan BAI Korea melalui penandatanganan MoU pembaharuan	BPK dan BAI menyelenggarakan pertemuan bilateral dalam rangka penandatanganan MoU pembaharuan dalam bidang pemeriksaan sektor publik pada 1 September 2022.

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
10. BPK dan NIK Polandia perkuat kerja sama melalui peningkatan kapasitas pemeriksaan TI	BPK menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan NIK Polandia untuk membahas penguatan kerja sama bilateral kedua institusi serta diskusi mengenai pendekatan dan metodologi pemeriksaan berbasis teknologi informasi (TI) pada 12 Oktober 2022 di Warsawa, Polandia.
11. BPK dan ACH Rusia menyelenggarakan <i>Working Meeting</i> guna memperkuat kapasitas bidang Pemeriksaan pada Lembaga Internasional	BPK dan The Accounts Chamber of the Russian Federation (ACH Rusia) menyelenggarakan <i>Working Meeting on international organisations audit</i> pada tanggal 30 Oktober 2022.
12. BPK perkuat kerja sama dengan Federal Court of Accounts Brazil melalui Penandatanganan MoU	BPK dan the Federal Court of Accounts Brazil melaksanakan penandatanganan kerja sama bilateral dalam bidang pemeriksaan sektor publik pada 8 November 2022.

Auditor Eksternal Lembaga Internasional

Penugasan BPK sebagai pemeriksa eksternal International Atomic Energy Agency (IAEA) merupakan salah satu langkah awal BPK dalam membuka pintu dunia. Kepercayaan IAEA selama tiga periode pemeriksaan menjadi tonggak bahwa BPK telah dipercaya lembaga internasional sebagai pemeriksa eksternal. Hal ini pun kemudian berlanjut ke lembaga-lembaga lain di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misalnya saja Institute Maritime Organization (IMO) yang turut menunjuk BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka. Dalam hal ini, BPK pun memiliki target besar untuk menjadi auditor eksternal United Nations Board of Auditors (UN BoA) pada 2026.

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
1. Pemeriksaan BPK atas International Atomic Energy Agency (IAEA)	BPK melakukan supervisi pemeriksaan di kantor pusat IAEA di Wina, Austria ketika pemeriksaan laporan keuangan IAEA TA 2021 pada Februari-Maret 2022.
2. Pemeriksaan BPK atas International Maritime Organization (IMO)	Pada 2022, BPK telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan IMO TA 2021, termasuk laporan keuangan konsolidasi IMO, WMU, dan IMLI, serta pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan dilaksanakan pada Maret 2022 secara fisik di Kantor Pusat IMO di London, Inggris.
3. 40th Session of Board of Governors' Meeting World Maritime University (WMU)	Sebagai pemeriksa eksternal International Maritime Organization (IMO), BPK memenuhi undangan Board of Governors World Maritime University (WMU) untuk hadir dalam pertemuan 40th Session of Board of Governors pada 6 Mei 2022.

Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan
4. Pertemuan ke-58 dengan pimpinan UN IAAC dan pertemuan UN IAAC dengan <i>Management Committee</i> PBB	BPK menghadiri pertemuan pimpinan United Nations Independent Audit Advisory Committee (UN IAAC) dengan <i>Management Committee</i> PBB. Kemudian menghadiri pertemuan rutin UN IAAC ke-58 pada 19-21 April 2022.
5. 127th Session of IMO Council Meeting	Sebagai pemeriksa eksternal Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO), BPK menghadiri the 127th Session of IMO Council Meeting, pada 12 Juli 2022 di kantor pusat IMO di London, Inggris.
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Isma Yatun terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) Periode Tahun 2023.	<p>Prestasi ini berhasil ditorehkan BPK setelah dinominasikan sebagai Ketua oleh Supreme Audit Institutions (SAI) anggota panel yang hadir secara <i>hybrid</i> pada pertemuan Panel ke-62 (the 62nd Regular Session of the UN Panel of External Auditors) yang berlangsung pada 28-29 November 2022 di Santiago, Chile.</p> <p>Setelah ini, BPK akan menjalankan tugas dan perannya, serta memimpin pertemuan Panel ke-63 (the 63rd Regular Session of the UN Panel of External Auditors) pada 20-21 November 2023 di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat.</p>





BAB 2

SAI20

Legasi BPK Untuk Dunia

Memanfaatkan momen-tum Presidensi G20 Indonesia pada tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menginisiasi pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20). SAI20 yang merupakan *engagement group* lembaga pemeriksa negara anggota G20, ber-fokus pada upaya terciptanya *good and accountable governance* melalui pening-katan peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah.

Proses pembentukan SAI20 dimulai sejak akhir 2020 dan secara resmi dikukuhkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022. Pelaksanaan KTT SAI20 berjalan sukses. Meski baru pertama kali dilaksanakan, KTT SAI20 mampu menghasilkan *rules of proce-dure* (RoP) atau aturan internal dan

komunike bersama.

Terbentuknya SAI20 menjadi sebuah legasi dari Indonesia, khususnya BPK, bagi dunia. Sejak pendirian G20 pada 1999, baru kali ini terbentuk *engage-ment group* SAI negara anggota G20.

Keberadaan SAI20 bertujuan men-dukung upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi dan akun-tabilitas pada tingkat global, terutama dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Selain itu, untuk mendorong pencapaian target-target Sustainable Development Goals (SDGs). Sejalan dengan tema Presidensi G20 Indone-sia, SAI20 mengusung tagline "*Recover Together, Recover Stronger through Foresight Capacity in the Framework of Leading Post-Covid19 Governance and Achieving SDGs Target*". ■



Bersama Mengawal Pemulihan Ekonomi Dan SDGs

Penanganan dampak pandemi Covid-19, termasuk untuk pemulihan ekonomi, membuat pemerintah di berbagai negara menghabiskan anggaran dana publik dengan jumlah fantastis. Sebagai mitra strategis pemerintah, SAI berperan memastikan agar penggunaan dana tersebut memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kehidupan warga negara. Hal ini sesuai prinsip International Organization of Supreme Audit Institutions Principles-12 (INTOSAI P-12): *The Value and Benefits of Supreme Audit Institutions - "Making a difference to the lives of the citizens"*.

Melalui inisiatif pembentukan SAI20, BPK mengajak SAI negara-negara G20 untuk berperan dalam mendorong, mengawal, dan mengingatkan pemerintah agar kembali memperhatikan pencapaian SDGs.



Sumber daya pemerintah yang difokuskan untuk menangani dampak pandemi, menghambat upaya pencapaian target Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs). Padahal, negara-negara di dunia sejak 2015 telah bekerja keras untuk mencapai target SDGs.

Melalui inisiatif pembentukan SAI20, BPK mengajak SAI negara-negara G20 untuk berperan dalam mendorong, mengawal, dan mengingatkan pemerintah agar kembali memperhatikan pencapaian SDGs. Atas alasan itu, SAI20 mengusung dua isu prioritas utama, yaitu Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi dan Mendukung Pencapaian SDGs.

Penjabaran komitmen dan rekomendasi SAI20 atas kedua isu tersebut, telah dituangkan dalam komunike bersama yang disahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Nusa Dua, Bali, 29-30 Agustus 2022. Salah satu isi komunike menekankan bahwa SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

Tujuan Pembentukan **SAI20**

SAI20 dibentuk sebagai *platform* pertemuan SAI negara anggota G20 untuk:

Berkontribusi kepada Pemimpin G20

SAI20 memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20 dalam dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.



Forum Sharing Knowledge

SAI20 merupakan ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antar SAI anggota negara G20, terutama dalam penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan pencapaian SDGs.



Kolaborasi Multistakeholders

SAI20 membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.

Isu Prioritas **SAI20**

Dalam semangat *"Recover Together, Recover Stronger"* sesuai tema Presidensi G20 Indonesia, SAI20 mengusung dua isu prioritas utama, yaitu:

Isu Prioritas 1: **Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi**

Isu yang diangkat SAI20, antara lain, mengenai kebijakan yang diambil pemerintah dalam memitigasi dampak pandemi Covid-19. Kebijakan yang diambil pada masa krisis membutuhkan pengambilan keputusan dengan segera dan memunculkan risiko terjadinya penyimpangan, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

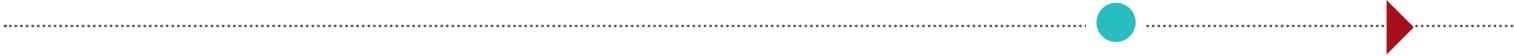
Isu Prioritas 2: **Mendukung Pencapaian SDGs**

SAI20 menyoroti hilangnya momentum upaya pencapaian SDGs oleh pemerintah akibat peralihan fokus dan sumber daya untuk menangani pandemi. SAI20 berupaya untuk mendorong agar pencapaian target SDGs oleh pemerintah *"back on track"*.

Proses Pembentukan **SAI20**

Persiapan pembentukan Supreme Audit Institution 20 (SAI20) telah dimulai sejak akhir 2020. Setelah ide membentuk SAI20 tercetus, BPK gencar melakukan koordinasi dengan kementerian terkait. BPK juga melakukan *lobby* dan pendekatan kepada SAI negara-negara G20 serta International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Kegiatan resmi pertama SAI20 adalah penyelenggaraan SAI20 Technical Meeting di Nusa Dua, Bali, pada 26-27 Januari 2022.

Periode 2021



Mei 2021

Penyusunan *Issue Note* SAI20 yang menjelaskan isu-isu prioritas.

12 November 2021

Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) on Cross-Cutting Issues with Working Groups and Engagement Groups of G20, dengan mengundang perwakilan dari Anti-Corruption Working Group (ACWG), C20, P20, dan Y20.

November 2021

Permintaan dukungan secara formal kepada SAI-SAI negara G20 melalui Surat Ketua BPK.

27 Oktober 2021

Komunikasi dengan Sekretariat Jenderal INTOSAI melalui *bilateral talk*.

14 Desember 2021

Pelaksanaan *High Level Meeting* Ketua BPK dan Sekretaris Jenderal INTOSAI membahas dukungan pembentukan SAI20.

Periode 2022

Penyelenggaraan FGD SAI20 dengan *prominent experts* untuk memperkaya *issue note*.

13 Januari 2022

Penyelenggaraan SAI20 *Preparatory Meeting* untuk komunikasi awal persiapan *technical meeting* dengan anggota SAI20. *Technical meeting* SAI20 digelar secara hibrida dari Nusa Dua, Bali, pada 26-27 Januari 2022 sebagai sebagai kegiatan resmi pertama SAI20.

7 Januari 2022

SAI20 Technical Meeting

 **Nusa Dua, Bali.**
26-27 Januari 2022.

- Menghasilkan *output* berupa masukan untuk *rules of procedure* (RoP) dan isu prioritas SAI20.
- Peluncuran situs www.sai20.org oleh Ketua BPK.
- Kegiatan ini dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan diikuti SAI Argentina, Australia, Brasil, China, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Turki.
- Sejumlah SAI negara sahabat turut menghadiri *technical meeting*, yaitu SAI Peru, Polandia, dan Uni Emirat Arab (UEA). Selain itu, dihadiri *observer* dari *engagement group* dan *working group G20*, serta organisasi internasional.



SAI20 Senior Officials Meeting (SOM)

📍 20–21 Juni 2022
Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

- Anggota SAI20 yang hadir setuju untuk mengesahkan *rules of procedure* (RoP).
- Penyusunan draf komunike SAI20.
- SAI20 SOM diikuti 12 SAI negara anggota G20 secara fisik dan virtual, yaitu SAI Argentina, Australia, Brasil, China, India, Indonesia, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.
- SAI20 SOM turut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta undangan, yaitu SAI Spanyol, SAI UEA, perwakilan Duta Besar Polandia, serta perwakilan WG/EG G20 seperti ACWG, Y20, dan U20.



“

Saya mengapresiasi inisiatif pembentukan SAI20 oleh BPK dalam kerangka Presidensi G20 Indonesia. Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia.

WAKIL PRESIDEN
MA'RUF AMIN



“

Melalui komunike, SAI20 menunjukkan peran, komitmen, dan rekomendasi untuk memastikan efektivitas program dan kebijakan G20. Terutama terkait dua isu prioritas SAI20, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan pencapaian target SDGs.

KETUA BPK **ISMA YATUN**

● **SAI20 Summit/ Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20**

📍 29–30 Agustus 2022
Nusa Dua, Bali

Hari Pertama KTT SAI20

- Pembukaan KTT SAI20 dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
- KTT SAI20 diikuti 12 SAI negara anggota G20.
- Delapan SAI hadir secara fisik, yaitu BPK RI, SAI Australia, Argentina, Brasil, Arab Saudi, Korea Selatan, Adapun empat SAI yang mengikuti KTT SAI20 secara virtual adalah SAI Meksiko, Afrika Selatan, China, dan Turki.
- Mengadopsi *rules of procedure* (RoP) yang sebelumnya telah disepakati dalam Senior Official Meeting.
- *Sharing session/bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tentang “Global Health Architecture”.*

Hari Kedua KTT SAI20

- Dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.
- *Sharing session* bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate dan Menteri ESDM Arifin Tasrif tentang “Green Economy, Energy Transition, and Digital Transformation”.
- Pengesahan Komunike SAI20.



“

Terbentuknya SAI20 yang diinisiasi BPK dapat memperkuat upaya pemerintah negara G20 dalam mencapai pemulihan ekonomi dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

KETUA DPR
PUAN MAHARANI

“

KTT SAI20 merupakan peristiwa bersejarah, yang pertama kalinya diselenggarakan sebagai pengukuhan terbentuknya SAI20 menjadi *engagement group* di G20.

KETUA BPK
ISMA YATUN

Hasil KTT SAI20

Penyelenggaraan KTT SAI20 pada 29-30 Agustus 2022 menghasilkan komunikasi bersama dan mengadopsi *rules of procedure* (RoP).

ISI RULES OF PROCEDURE SAI20

Background

Menjelaskan maksud dan tujuan SAI20.



Principles

Berisi prinsip-prinsip dan nilai yang dianut oleh SAI20.



Function

Mengatur keanggotaan SAI20, keberlangsungan, sistem keketuaan, dan *observer* dalam kegiatan SAI20.



General Rules

Mengakomodasi cakupan RoP dan bahasa resmi yang digunakan dalam sidang SAI20.



Events

Menjelaskan pengaturan kegiatan SAI20.



Output

Mengatur bentuk, proses penyusunan, dan diseminasi *output* SAI20.



Ikhtisar Komunike SAI20

Mempromosikan kolaborasi, termasuk melalui berbagai pengetahuan dan praktik terbaik di antara SAI negara-negara G20 dan dengan para pemangku kepentingan terkait, guna berkontribusi memperkuat pengawasan, wawasan, dan memberikan pandangan ke depan yang strategis untuk mendorong tata kelola yang akuntabel.

1.

Menyadari dan mengakui adanya perbedaan mandat yang dimiliki masing-masing SAI negara anggota. Perlunya memastikan kesatuan dan integritas komunitas SAI di bawah *platform* dan inisiatif INTOSAI serta mengembangkan *platform* untuk memperkuat peran SAI sebagai mitra strategis pemerintah G20 dalam menjawab tantangan global.

2.

Menekankan tiga isu prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital yang akan terus dipimpin oleh pemerintah G20, antara lain, untuk membantu memastikan akses yang adil atas vaksin Covid-19 serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

3.

Pandemi Covid-19 tidak hanya meningkatkan risiko *fraud* seiring langkah cepat yang harus diambil pemerintah, tetapi juga melebarkan ketimpangan karena target pembangunan tidak tercapai sehingga menghambat upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara global.

4.

Pandemi Covid-19 tidak hanya meningkatkan risiko *fraud* seiring langkah cepat yang harus diambil pemerintah. Akan tetapi juga melebarkan ketimpangan karena target pembangunan tidak tercapai sehingga menghambat upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) secara global.

5.

SAI perlu fokus pada respons pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan melanjutkan upaya intensif untuk mencapai Agenda 2030.

6.

Audit sektor publik memiliki peran penting dalam mempromosikan efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik sambil mendukung respons global terhadap krisis Covid-19 dan implementasi SDGs.

7.

SAI20 berkomitmen membantu pemerintah mengidentifikasi potensi risiko, dampak, dan kemungkinan respons yang akan diterapkan untuk menghasilkan kebijakan publik yang baik dan mendorong tata kelola yang baik, serta berkontribusi dalam tindak lanjut dan tinjauan implementasi SDGs.

8.

Menyerukan pemerintah negara G20 untuk melakukan sejumlah hal terkait keberlanjutan dan inklusivitas pemulihan ekonomi. Beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain, meningkatkan koherensi kebijakan, perencanaan terkoordinasi, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang baik dalam mengelola keadaan darurat, termasuk pentingnya pencegahan krisis, kesiapsiagaan, dan koordinasi di seluruh struktur tata kelola utama. Selain itu, terus mendorong transisi energi berkelanjutan.

9.

Perlunya keterlibatan *multistakeholder* dalam merespons isu global.

10.

Dalam menghadapi ketidakpastian, kompleksitas, perubahan yang cepat, dan tantangan yang muncul, SAI sebagai lembaga independen eksternal penting untuk mengejar inisiatif yang komprehensif dan berperan aktif dalam mendorong efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi administrasi publik.

11.

Berterima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah memprakarsai pembentukan SAI20 dan menyelenggarakan KTT pertamanya di bawah Presidensi G20 Indonesia. SAI 20 mendukung the Comptroller and Auditor General of India, and the President of the Federal Court of Accounts-Brazil sebagai Chair of SAI20 pada 2023 and 2024. ■

12.





BAB 3

Tentang BPK

Nama : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Awal Pendirian : 1 Januari 1947

Sejarah

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

1 Januari 1947 • Awal Pembentukan

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluaran Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang. Pada waktu itu Badan Pemeriksa Keuangan hanya mempunyai 9 orang pegawai dan sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan pertama adalah R Soerasno.

14 Desember 1949 • Dewan Pengawas Keuangan

Ketika itu, terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949. Kemudian, dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS.



• 6 November 1948 Kedudukan di Yogyakarta

Dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948 tanggal 6 November 1948, tempat kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia dengan ibu kota Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945.

• 1 Oktober 1950 Badan Pemeriksa Keuangan (UUDS 1950)

Pada tanggal 17 Agustus 1950, bentuk negara kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, sejak tanggal 1 Oktober 1950, Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950.

• 5 Juli 1959 Badan Pemeriksa Keuangan (UUD 1945)

Pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

12 Oktober 1963 • Perpu No. 6 Tahun 1964

Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (Perpu) No. 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

UU No. 5 Tahun 1973 • Badan Pemeriksa Keuangan

Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai menteri koordinator dan menteri.

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan No.X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan ke posisi dan fungsi semula sebagai lembaga tinggi negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada tahun 1973 dengan UU No. 5 tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

TAP MPR No.VI/MPR/2002 • Independen dan Profesional

Dalam era Reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam sidang tahunan tahun 2002. Dukungan ini memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara. Ini ditegaskan dengan dikeluarkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional. ■

Dasar Hukum

- a. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VIIIA - Badan Pemeriksa Keuangan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 Tentang badan pemeriksa keuangan
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 Tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaharaan negara
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 Tentang keuangan negara



Visi dan Misi **BPK**

◆ VISI

Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

◆ MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan.
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara.
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Tujuan

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Sasaran Strategis

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Nilai-Nilai Dasar

Pencapaian cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan kepada nilai-nilai dasar sebagai berikut:



Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.



Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.



Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.



AHMADI NOOR SUPIT
ANGGOTA BPK

PIUS LUSTRILANANG
ANGGOTA BPK

ACHSANUL QOSASI
ANGGOTA BPK

NYOMAN ADHI SURYADNYANA
ANGGOTA BPK

ISMA YATUN
KETUA BPK

AGUS JOKO PRAMONO
WAKIL KETUA BPK



Pimpinan **BPK RI**

Tahun 2022 menjadi tahun bersejarah bagi BPK. Karena, pada tahun ini, posisi Ketua BPK pertama kali diisi oleh perempuan. Isma Yatun terpilih menjadi Anggota BPK periode jabatan 2022-2027 pada Selasa, 19 April 2022 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Kemudian pada Kamis, 21 April 2022 atau bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Isma mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pengucapan sumpah itu menjadikan Isma sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua BPK.

Bersamaan dengan terpilihnya Isma, Haerul Saleh juga ditetapkan sebagai Anggota BPK. Kedua Anggota BPK terpilih tersebut menggantikan Anggota BPK yang berakhir masa jabatannya, yaitu Agung Firman Sampurna (Ketua merangkap Anggota BPK) dan Isma Yatun (Anggota BPK). Dalam hal ini, Isma Yatun kembali terpilih dan memasuki periode jabatan kedua sebagai Anggota BPK.

Kemudian Sidang Paripurna DPR yang berlangsung Selasa, 27 September 2022 secara resmi mengesahkan Ahmadi Noor Supit sebagai Anggota BPK periode 2022-2027. Noor Supit dipilih untuk menggantikan kekosongan setelah anggota BPK Harry Azhar

Azis meninggal pada 18 Desember 2021. Harry Azhar saat itu menjabat sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/ Anggota V BPK.

Dengan keterpilihan Noor Supit, maka keanggotaan BPK telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006. Undang-undang menyatakan bahwa pimpinan BPK memiliki 9 (sembilan) Anggota yang dipilih DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota BPK lainnya yaitu Agus Joko Pramono, Hendra Susanto, Pius Lustrilanang, Achsanul Qosasi, Nyoman Adhi Suryadnyana, dan Daniel Lumban Tobing.



Pada Kamis, 21 April 2022 atau bertepatan dengan peringatan Hari Kartini, Isma mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua BPK di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Ketua **BPK RI**



Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua.
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK.
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri.
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek Tugas dan Wewenang

- Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.

Wakil Ketua **BPK RI**



Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.,
CSFA., CPA., CFrA., QGIA., CGCAE.

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua.
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan.
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Objek Tugas dan Wewenang

- Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan.



Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.

Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara/Anggota I BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.

Pimpinan Pemeriksaan
Keuangan Negara/Anggota II BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota III BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, Kemenristek-BRIN, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota IV BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PUPR, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





Ir H Ahmadi Noor Supit

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota V BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CFrA., CSFA.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota VI BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.





Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.

Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/
Anggota VII BPK RI

Tugas dan Wewenang

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Objek Tugas dan Wewenang:

- Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ketua, Wakil Ketua, dan 7 Anggota

5 Staf Ahli

Ditama
Revbang PKN

Inspektorat
Utama

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara I

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara II

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara III

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara IV

Auditorat
Utama
Keuangan
Negara V

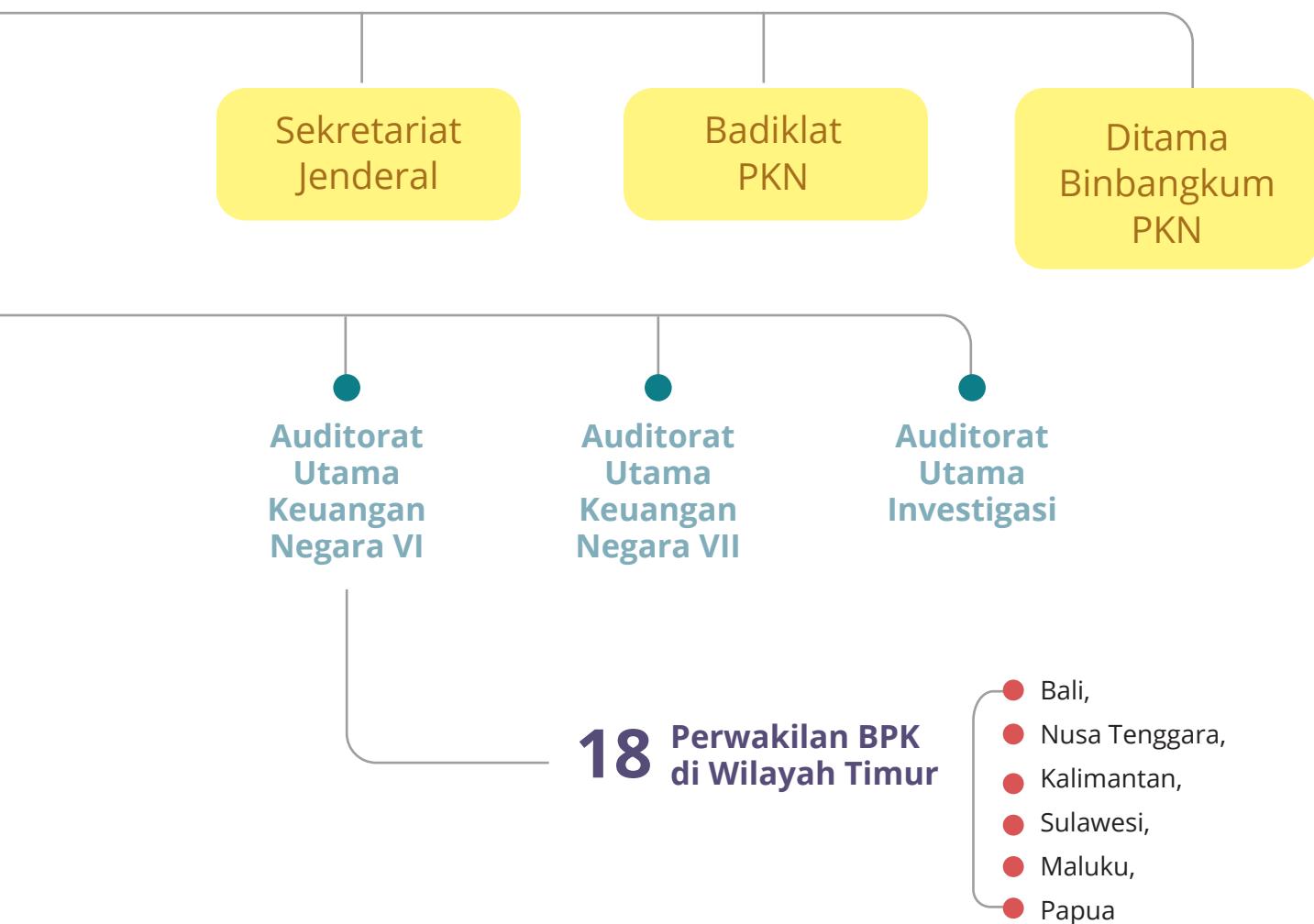
Jawa dan Sumatra

16 Perwakilan BPK
di Wilayah Barat

Catatan:

BPK memiliki kelompok jabatan fungsional di setiap struktur eselon II. Rincian jabatan fungsional tersebut dan peta jabatannya diatur lebih lanjut di Peraturan Sekretaris Jenderal BPK No. 80 dan 81 Tahun 2019.

Struktur Organisasi **Badan Pemeriksa Keuangan RI**



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI

Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- Melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II

Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III

Sekretariat Jenderal

- Sekretariat Pimpinan
- Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional
- Sumber Daya Manusia
- Keuangan
- Teknologi Informasi
- Umum
- Pusat Kemitraan Global

Unit Pelaksana Tugas Penunjang

Inspektorat Utama

- Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan
- Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan
- Penegakan Integritas

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pe- meriksaan Keuangan Negara

- Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN
- Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN
- Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN

Unit Pelaksana Tugas Periksa

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) II

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN V, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada lingkup tugas AKN VI, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Ketua BPK RI

- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
- Melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
- Melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi
- dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV

Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN V

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VI

Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK RI

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan PKN

- Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
- Penelitian dan Pengembangan

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum PKN

- Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
- Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Staf Ahli

- Bidang Keuangan Pemerintah Pusat
- Bidang Keuangan Pemerintah Daerah
- Bidang Manajemen Risiko
- Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/ Daerah yang Dipisahkan Lainnya
- Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN IV, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK Perwakilan

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kota/ Kabupaten, BUMD dan lembaga terkait pada lingkup tugas AKN V dan AKN V.

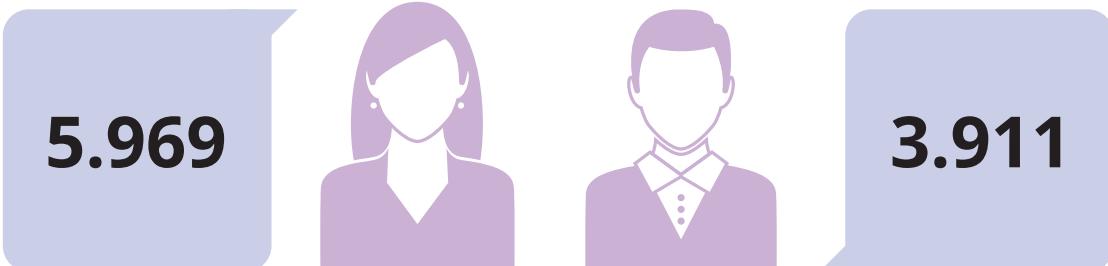
Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VII

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN VII, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Auditorat Utama Investigasi

Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Data Pegawai Berdasarkan Gender



Total:
9.880

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

D3

Pria	:	220
Wanita	:	244
Total	:	464

S1/D4

Pria	:	2.874
Wanita	:	2.530
Total	:	5.404

S2

Pria	:	1.507
Wanita	:	919
Total	:	2.426

S3

Pria	:	37
Wanita	:	11
Total	:	48

Lainnya

Pria	:	1.331
Wanita	:	207
Total	:	1.538

Total

Pria	:	5.969
Wanita	:	3.911
Total	:	9.880

Data Jumlah Pegawai Perwakilan

Nama Perwakilan	Pria	Wanita	Total
BPK Perwakilan Provinsi Aceh	132	106	238
BPK Perwakilan Provinsi Bali	100	68	168
BPK Perwakilan Provinsi Banten	64	43	107
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	87	54	141
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	65	46	111
BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta	132	73	205
BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo	70	33	103
BPK Perwakilan Provinsi Jambi	87	64	151
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat	140	75	215
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah	167	105	272
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur	160	112	272
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat	103	54	157
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	91	70	161
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	89	72	161
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur	93	55	148
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara	62	35	97
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	71	50	121
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	82	44	126
BPK Perwakilan Provinsi Lampung	104	76	180
BPK Perwakilan Provinsi Maluku	90	38	128
BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	70	50	120
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat	93	63	156
BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur	141	93	234
BPK Perwakilan Provinsi Papua	161	95	256
BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat	92	54	146
BPK Perwakilan Provinsi Riau	104	86	190
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat	81	34	115
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan	126	112	238
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah	112	57	169
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara	135	74	209
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara	104	84	188
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	115	80	195
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan	126	117	243
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara	153	109	262

Sebaran Kantor BPK RI

BPK RI MEMILIKI:

1

Kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia.

34

Kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi.

1

Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta.

4

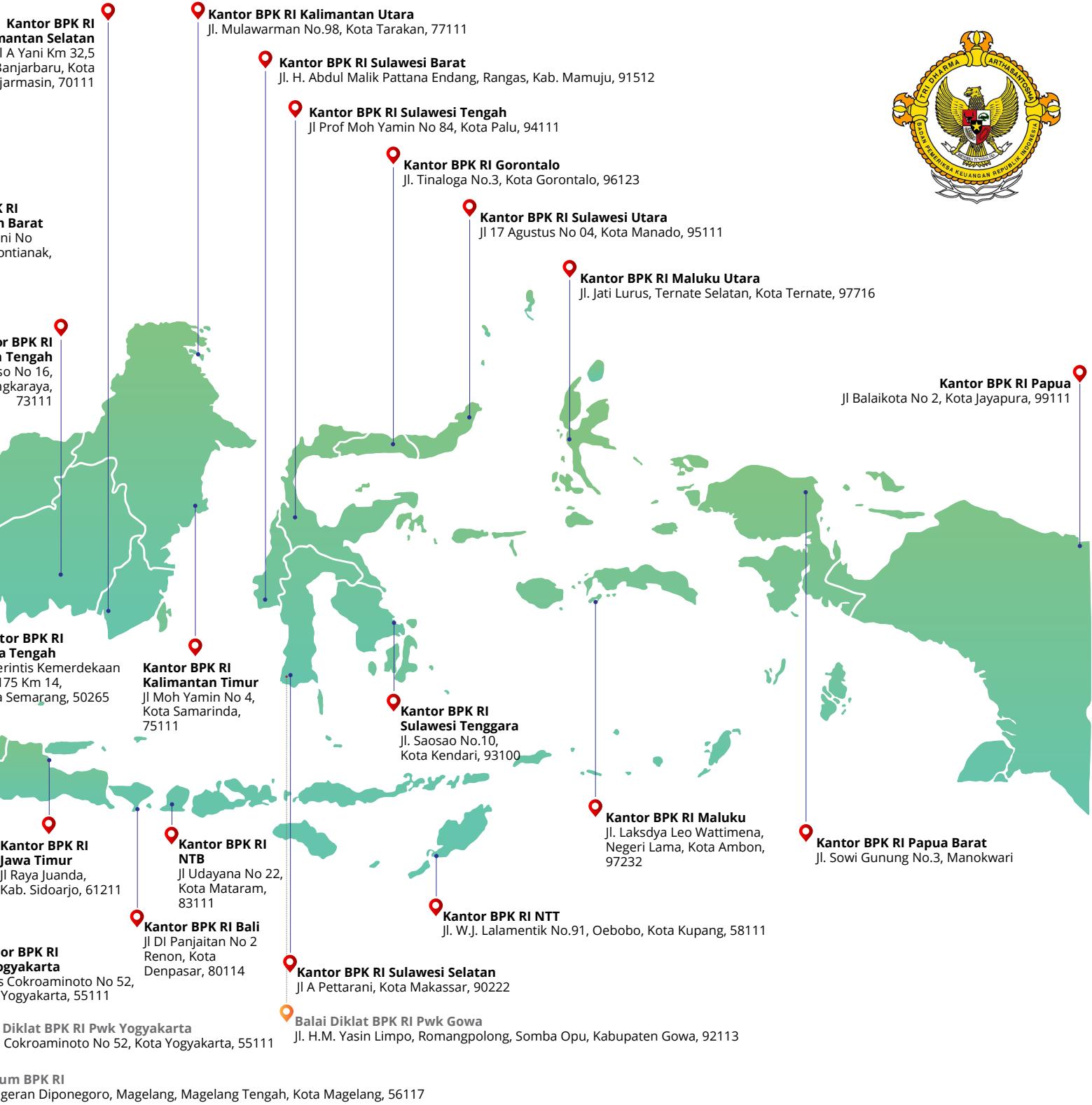
Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar.

Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

92

Laporan Tahunan 2022 Badan Pemeriksa Keuangan





Meningkatkan Kiprah Internasional dengan PKG

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk satuan kerja (satker) baru pada 2022. Satker tersebut adalah Pusat Kemitraan Global atau yang disebut juga dengan PKG.

PKG dibentuk sebagai wujud komitmen BPK untuk terus meningkatkan kiprah di kancah internasional. Satker tersebut berfokus pada pemeriksaan internasional.

PKG yang terbentuk pada Agustus 2022, dilatarbelakangi keberhasilan BPK dalam menjalankan pemeriksaan yang diamanahkan lembaga-lembaga internasional. BPK telah dipercaya menjadi auditor eksternal oleh International Anti-Corruption Academy (IACA) serta dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu International

Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO).

PKG juga menjadi bentuk kontribusi BPK dalam meningkatkan reputasi dan citra Indonesia yang secara aktif ikut serta melaksanakan ketertiban dunia sesuai Pembukaan UUD 1945.

Pembentukan PKG pun sejalan dengan optimalisasi kebijakan luar negeri pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN mengamanahkan adanya peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global serta penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan luar negeri pemerintah.



Dasar Hukum Pembentukan Pusat Kemitraan Global:

Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Tugas dan Fungsi Pusat Kemitraan Global

Tugas:

Melaksanakan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain.

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Pusat Kemitraan Global.
- b. Pelaksanaan analisis kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain.
- c. Penyusunan proposal pengajuan pencalonan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain.
- d. Koordinasi dan pelaksanaan promosi pencalonan dan kampanye peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain;

- e. Pelaksanaan kemitraan peningkatan akuntabilitas pada badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi, dan lembaga internasional lain.
- f. Pelaksanaan pengelolaan pengetahuan, urusan ketatausahaan, prasarana dan sarana, sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan, dan umum Pusat Kemitraan Global,
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pusat Kemitraan Global.
- h. Pelaksanaan pengelolaan risiko Pusat Kemitraan Global.
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Kemitraan Global.
- j. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.





BAB 4

Tantangan ke Depan

BPK telah menorehkan berbagai prestasi sepanjang 2022. Meskipun begitu, BPK masih akan menghadapi berbagai tantangan pada masa mendatang. Baik itu dari sisi internal maupun eksternal BPK.

Apalagi mengingat kondisi pandemi yang masih belum selesai yang pastinya memengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Hingga situasi ekonomi dan politik negara yang masih belum menentu. Tantangan ini harus dihadapi dan diperlukan strategi serta langkah nyata yang efektif untuk mengatasinya.

SDM yang Memberikan Manfaat

Dari sisi internal, tantangan terbesar BPK antara lain terkait dengan sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini, bagaimana menyiapkan pemeriksa yang mampu menerapkan nilai-nilai dasar yang dianut BPK, yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme.

Apalagi, pada 2022, BPK mendapatkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang cukup banyak, yaitu 1.405 orang. Ini merupakan jumlah CPNS terbanyak yang pernah diterima BPK. Tantangannya adalah para CPNS ini masuk pada masa pandemi Covid-19. Sehingga, ada perbedaan dalam proses pendidikan dan pelatihan (diklat) para CPNS.

Program diklat yang biasanya dilakukan secara menyeluruh dan tatap muka harus dijalankan secara daring (*online*). Hal ini menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang membatasi ruang gerak dan pertemuan fisik pegawai BPK. Hal ini pun menimbulkan kekhawatir-

an kalau pemantapan nilai-nilai dasar BPK untuk para CPNS kurang tersampaikan dengan baik.

Hal ini harus dapat diatasi dengan baik sejalan dengan komitmen BPK pada tahun 2023 untuk melanjutkan berbagai reformasi dalam melaksanakan salah satu misinya. Yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia.

Tak hanya itu, BPK juga memiliki tantangan untuk menghasilkan SDM yang tak hanya mampu menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Dalam hal ini pemeriksaan yang sesuai dengan SPKN (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara) dan ketentuan peraturan yang ada.

SDM BPK juga harus mampu dapat memberikan manfaat bagi entitas yang diperiksa. Hal ini sejalan dengan visi dan misi BPK, yaitu untuk melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Jika dapat memberikan manfaat, maka akan terlihat dampak dari setiap rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

Karena bisa saja terjadi bahwa rekomendasi yang disampaikan BPK tidak pas atau sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Hal ini pun dapat menjadi refleksi diri bagi BPK. Jangan sampai BPK hanya mengeluarkan rekomendasi se-

banyak-banyaknya, namun tapi tidak ada dampak yang dihasilkan.

Terkait itu, penting bagi pemeriksa BPK untuk memiliki kemampuan ber-komunikasi yang baik. Harus ada standar bagi pemeriksa untuk membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Termasuk juga komunikasi dalam proses tindak lanjut.

Melakukan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat harus menjadi salah satu hal yang akan terus dijalankan BPK ke depannya. Karena ini bisa menjadi cara yang efektif untuk mendorong entitas untuk menyelesaikan rekomendasi yang diberikan. Dengan begitu, nantinya BPK tak perlu untuk mengejar entitas untuk menyelesaikan rekomendasi. Alih-alih, mereka akan menyelesaikannya sendiri dengan senang hati.



Harus ada standar bagi pemeriksa untuk membangun komunikasi yang efisien dan efektif di seluruh proses pemeriksaan.

Menuju Automasi

Terjadinya pandemi Covid-19 membuat perkembangan teknologi berjalan dengan sangat cepat. Bahkan, jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelum terjadi pandemi. BPK pun mencoba untuk mengikuti perkembangan terkait teknologi ini.

Hal ini antara lain dilakukan dengan mempertajam penerapan *big data analytic*. Hal ini sudah dilakukan BPK dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, praktiknya akan lebih dipertajam. Apalagi beberapa lembaga lain telah mengaplikasikan hal tersebut secara lebih optimal.

“

Kalau BPK ingin membuat seluruh laporan auditee masuk dengan baik, maka harus terstandar.

Optimalisasi peran *big data analytic* ini bukan hanya terkait soal automasi saja. Setidaknya, ada empat hal penting lainnya. Pertama, soal simplifikasi peraturan. Kemudian, standardisasi. Kalau BPK ingin membuat seluruh laporan *auditee* masuk dengan baik, maka harus terstandar. Jadi tidak perlu kerja dua kali karena sistemnya sama.

Untuk itu, BPK perlu membentuk standar. Dengan begitu, data yang diterima akan sesuai standar. Baik pengirim maupun pembaca, sama-sama bisa memahami data tersebut.

Yang ketiga adalah integrasi. Hal ini misalnya saja dengan mendorong sistem pembayaran pemerintah daerah agar tidak lagi manual. Harus lewat bank dan BPK bisa mengaksesnya secara langsung. Dengan begitu, ke depannya pemeriksaan tidak butuh tenaga pemeriksa yang banyak. Meskipun begitu, pekerjaan dapat terlaksana dengan baik, mulai dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT.

Yang keempat, yaitu automasi. Dalam pengelolaan organisasi ke depan harus menjadikan *big data analytic* sebagai ujung tombak dalam sistem pemeriksaan. Dengan begitu, BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat menentukan arsitektur keuangan negara.

Konsekuensinya, semua orang yang membutuhkan data keuangan negara harus datang ke BPK. Jika ini sudah dijalankan, maka rakyat Indonesia sebagai prinsipal negara ini akan semakin yakin bahwa BPK adalah lembaga yang betul-betul mampu memberikan penilaian profesional.

Pemeriksaan Semakin Berkualitas

“
UNCTAD memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot dari 2,5 ke 2,2 persen pada 2023.

Ekonomi dunia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan menghadapi krisis besar pada 2023. Hal ini terjadi di tengah berbagai masalah yang masih harus dihadapi saat ini. Mulai dari pandemi Covid-19, perang antara Rusia-Ukraina, hingga persoalan-persoalan geopolitik lainnya.

Berbagai situasi pun memperburuk pandangan dunia terhadap kondisi pada tahun depan. Bahkan, UNCTAD memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot dari 2,5 ke 2,2 persen pada 2023. Hal ini setidaknya disebabkan oleh empat alasan terkuat, yaitu pengaruh kondisi ekonomi global, peningkatan suku bunga bank, krisis pangan dan energi, serta ketidakpastian pasar dan utang.

Kondisi ini pun mau tidak mau akan ikut memengaruhi Indonesia dan pada akhirnya ikut berimbas kepada BPK. Karenanya, tantangan yang terbesar bagi BPK ke depannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

BPK juga memiliki tantangan terkait dengan dengan postur RAPBN 2023. Hal ini menyikapi pernyataan pemerintah mengenai hal-hal yang menjadi beban APBN. Mulai dari dana pensiun, gaji ASN, TNI, Polri, hingga subsidi BBM.

Karena hal ini pemerintah pun mengubah postur anggaran. Antara lain, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi yang mendapat reaksi negatif luar biasa dari masyarakat.

BPK pun diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat. Ini mengingat, BPK merupakan satu-satunya lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sejatinya, APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat mendapat kesejahteraan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini, peran BPK sangat krusial untuk memastikan bahwa APBN itu bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan. Akan tetapi juga terukur akuntabilitasnya.

Apalagi, tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang 2024. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPK. Keuangan negara harus dijaga agar mengalir sesuai dengan peruntukannya dan tidak menjadi anggaran politik 2024. Terkait itu, BPK pun akan menyiapkan langkah-langkah strategis sebagai komitmen BPK dalam melaksanakan tata kelola yang transparan dan berkesinambungan.

BPK telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan hasil pemeriksaan yang berkualitas. Misalnya saja dengan terus meningkatkan efektivitas sistem pengendalian mutu (*quality control*) dan efektivitas keyakinan mutu (*quality assurance*) di tingkat pemeriksaan maupun kelembagaan.

BPK juga mendorong agar pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Sebab, masyarakat semakin paham, bahwa dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah merupakan uang yang diamanatkan kepada pengelola pemerintahan. Karenanya, ketebukaan penggunaan dana merupakan sebuah keharusan. ■



BPK pun diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrumen untuk kesejahteraan rakyat.

Melanjutkan Peran *Foresight*

Tak hanya itu, sejalan dengan fungsi *foresight* lembaga pemeriksa (*supreme audit institution*), BPK juga harus dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk dapat mengantisipasi berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Seperti yang telah dilakukan BPK saat meluncurkan *foresight* pertama mengenai skenario yang mungkin dapat terjadi dengan adanya pandemi Covid-19 pada 2021.

BPK pada Oktober 2021 telah merilis *foresight* pertama bertema "Membangun Kembali Indonesia dari Covid-19: Skenario, Peluang dan Tantangan Pemerintah yang Tangguh". *Foresight* BPK memberikan gambaran kemungkinan yang dapat terjadi pada Indonesia untuk kurun waktu lima tahun, yaitu pada 2021-2026 akibat pandemi Covid-19.

“

Penyusunan *foresight* BPK merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dua prinsip yang ada dalam INTOSAI 12 “Principles on the Value and Benefits of SAIs—Making a Difference to the Lives of Citizens”.

Penyusunan *foresight* BPK merupakan upaya untuk mengaktualisasikan dua prinsip yang ada di dalam INTOSAI 12 "Principles on the Value and Benefits of SAIs-Making a Difference to the Lives of Citizens". Prinsip pertama, yaitu "Demonstrating ongoing relevance to citizens, parliament, and other stakeholders" (menunjukkan relevansi berkelanjutan bagi warga negara, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya). Sedangkan prinsip yang kedua adalah "Being a credible source of independent and objective insight and guidance to support beneficial change in the public sector" (menjadi sumber yang kredibel untuk wasan dan panduan yang independen dan objektif untuk mendukung perubahan yang bermanfaat di sektor publik).

Dengan *foresight* ini, maka BPK menjadi lembaga pemeriksa atau *supreme audit institution* (SAI) ke-11 di dunia dan ke-2 di Asia yang menjalankan peran *foresight*.

Kemungkinan yang dapat terjadi dalam lima tahun ke depan dituangkan dalam empat skenario. Skenario pertama adalah "Berlayar Menaklukkan Samudra". Skenario kedua, "Mengarung di Tengah Badai". Ketiga, "Tercerai-berai Terhempas Lautan". Sedangkan skenario keempat yaitu "Kandas Telantar Surutnya Pantai".

Empat skenario tersebut merupakan empat kuadran yang terbentuk dari dua fundamental *uncertainties*, yaitu tingkat keparahan pandemi dan respons pemerintah terhadap kondisi krisis dengan menggunakan *endpoint analysis*. Dalam setiap skenario diuraikan hal-hal yang mungkin terjadi pada masa depan pada delapan sektor, yaitu kesehatan, perekonomian, keuangan, sosial, politik, pendidikan, lingkungan hidup, dan teknologi.

Pencapaian ini pun harus dilanjutkan. Karenanya, ke depan, BPK memiliki tantangan untuk dapat menghasilkan pencapaian terkait dengan *foresight* untuk sektor-sektor lainnya.



Peran terbesar pemanfaatan *big data* ini pun berada di tangan pemeriksa.

Hal ini pun tidak lepas dari pemanfaatan teknologi karena analisis *big data* sangat kuat dalam memberikan pemahaman kepada pemeriksa terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Dengan *big data*, bisa memberikan *red flag* kepada pemeriksa atau indikasi permasalahan yang signifikan.

Peran terbesar pemanfaatan *big data* ini pun berada di tangan pemeriksa. Pemeriksa bisa mengidentifikasi permasalahan apa yang akan dihadapi, data apa yang tersedia, bagaimana bentuk datanya? Terstruktur atau

tidak terstruktur? Siapa yang punya data? Nantinya, SDM di bidang TI yang dapat membantu dalam mendapatkan dan mengolah data itu.

Dengan menggunakan *big data, foresight* yang disampaikan BPK juga akan didukung dengan argumentasi yang kuat karena berlandaskan data dengan jumlah banyak (komprehensif). Dengan begitu, BPK dapat melakukan analisis tren ke depan dan mempertimbangkan berbagai faktor atau keterkaitan antarkejadian dengan data yang besar.

Semakin Mendunia



RPJMN mengamanahkan adanya peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global serta penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan luar negeri pemerintah.

BPK telah menorehkan berbagai prestasi di kancah internasional. Bahkan, dapat dikatakan, kalau BPK telah ikut mengharumkan nama Indonesia dengan berbagai pencapaian. Karenanya, BPK punya cita-cita yang tinggi di kancah global.

Upaya BPK meningkatkan reputasi dan citra Indonesia secara aktif juga ikut mewujudkan ketertiban dunia sesuai Pembukaan UUD 1945. Selain itu, sejalan dengan optimalisasi kebijakan luar negeri pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020/2024.

RPJMN mengamanahkan adanya peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global serta penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi kementerian/lembaga dalam melaksanakan kebijakan luar negeri pemerintah.

Untuk terus meningkatkan kiprah di kancah dunia, BPK pun membentuk Pusat Kemitraan Global (PKG) yang berfokus kepada pemeriksaan internasional. Pembentukan PKG dilatarbelakangi keberhasilan BPK dalam menjalankan pemeriksaan yang diamanahkan lembaga-lembaga internasional.

Sebelumnya, BPK telah dipercaya menjadi auditor eksternal oleh IACA (International Anti-Corruption Academy). Termasuk juga dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu International Atomic Energy Agency (IAEA) dan International Maritime Organization (IMO). IAEA bahkan memercayakan BPK sebagai pemeriksa eksternal mereka selama tiga periode pemeriksaan atau selama enam tahun.

Keterlibatan di dunia internasional ini juga dianggap penting untuk meningkatkan kapasitas para auditor BPK. Peningkatan kapasitas tersebut bukan hanya bisa didapat oleh pemeriksa yang menjadi tim auditor eksternal di lembaga internasional, tetapi juga bagi pemeriksa lainnya.

Sebab, para pemeriksa yang berpengalaman di level internasional, akan berbagi pengalaman, pengetahuan, hingga menularkan etos kerja kepada rekan-rekannya.

BPK memiliki target besar untuk menjadi auditor eksternal United Nations Board of Auditors (UN BoA) pada 2026. Sementara dalam waktu dekat, BPK akan mengikuti *bidding* sebagai auditor eksternal World Intellectual Property Organization (WIPO) dan International Labour Organization (ILO).

BPK juga sedang mengajukan nominasi untuk menjadi *host* INCOSAI XXVI tahun 2028. Hal itu sekaligus menjadi ketua INTOSAI untuk periode tahun 2028-2031.



Untuk terus meningkatkan kiprah di kancah dunia, BPK pun membentuk Pusat Kemitraan Global (PKG) yang berfokus kepada pemeriksaan internasional.

Laporan Tahunan 2022 merupakan bentuk Akuntabilitas
BPK RI kepada publik atas pengelolaan keuangan
negara yang dilakukan oleh BPK RI.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jalan Gatot Subroto Kav. 31
Jakarta Pusat 10210

Tel. (6221) 25549000, Faks. (6221) 57950288

Website: <http://www.bpk.go.id>

E-mail: eppid@bpk.go.id